

KBRI di Beijing Tutup Sementara Setelah Stafnya Positif Covid-19

BEIJING (IM) - Kedutaan Besar RI di Beijing, Tiongkok, tutup hingga 20 Desember 2022 setelah hasil tes PCR staf dan pegawai terdeteksi ke luar pada Kamis (15/12) terdeteksi positif Covid-19.

Sesuai protokol kesehatan di Beijing, bagi yang positif Covid-19-19 diharapkan melakukan karantina mandiri di rumah hingga dapat pulih kembali, demikian diumumkan KBRI Beijing.

Sebelum kembali dibuka, KBRI Beijing akan menggelar tes PCR secara independen pada Senin (19/12).

Sekiranya tes PCR menunjukkan hasil terbaik, KBRI Beijing mengatakan kantor perwakilan RI tersebut kembali dapat beroperasi secara reguler.

Sebelumnya, KBRI Beijing menggelar tes PCR massal secara independen untuk staf dan keluarganya pada Rabu (14/12). Hasil tes PCR tersebut keluar pada Kamis.

KBRI Beijing tidak menyebutkan berapa banyak anggota staf dan pegawainya yang hasil tes PCR-nya menunjukkan positif Covid-19.

"Mohon maaf hari ini pelayanan tutup. Silakan datang lagi Selasa (20/12) depan," kata Atase Imigrasi KBRI Beijing Raden Fitri Saptaji kepada dua warga negara Indonesia yang hendak mengajukan permohonan perpanjangan paspor.

Sejak otoritas Tiongkok mengumumkan pelonggaran kebijakan antipandemi Covid-19 pada Rabu (7/12), situasi di Beijing secara umum masih lengang karena banyak warga mengalami flu, yang diduga sebagai COVID-19 varian Omicron.

Terkait banyaknya warga yang mengeluh demam, Tiongkok mendirikan sekitar 14.000 unit klinik flu di kota kelas dua. Selain itu, terdapat pula 33.000 unit bangsal flu di berbagai pelosok. ● mei

Pemerintah Bentuk Timsus Cek Izin Kerumunan Saat Libur Akhir Tahun

JAKARTA (IM) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta wisatawan tak mengkhawatirkan KUIH baru saat berlibur pada perayaan Natal dan tahun baru mendatang. Dia meminta masyarakat berlibur dengan nyaman.

"Ada banyak pertanyaan mengenai penerapan UU KUIH yang baru. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri jangan khawatir untuk berwisata, di Indonesia saja yang aman, nyaman, dan menyenangkan," kata Sandiaga usai menggelar rapat koordinasi di Mabes Polri, Jumat (16/12).

Sandiaga memastikan liburan di Indonesia saat Nataru akan berlangsung aman dan menyenangkan.

"Jadi kita pastikan, yang disampaikan di medsos (media sosial) ini, tadi kami sudah berkoordinasi. Bahwa kita akan memastikan bahwa liburan anda di Indonesia saja, seperti

yang sudah kita launching juga. Bangga berwisata di Indonesia, akan kita pastikan aman, nyaman, dan menyenangkan," kata Sandiaga.

Fasilitasi Event

Selain kegiatan wisata, Sandiaga menyebut pemerintah juga akan memfasilitasi semua perayaan mulai dari konser hingga acara budaya lainnya saat Nataru. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia.

"Oleh karena itu pada akhir tahun, event akan kami fasilitasi dan telah dibentuk tim khusus untuk memastikan baik dari perizinan, crowd people, early warning system, sampai dengan jalur evakuasi ini terkoordinasi dengan baik. Sehingga semua event diharapkan berlangsung tentunya mematuhi protokol kesehatan, keamanan, dan protokol keselamatan," ujarnya. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



Kapolri: Operasi Lilin Digelar Mulai 22 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023

Fokus operasi lilin meliputi kelancaran lalu lintas serta kenyamanan ibadah Natal 2022 dan liburan Tahun Baru 2023.

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Operasi Lilin akan digelar mulai 22 Desember 2022 sampai 3 Januari 2023. Operasi Lilin digelar dalam rangka pengamanan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Operasi Lilin akan mulai berjalan kurang lebih 11 hari mulai kita laksanakan gelar di tanggal 22 atau 23 (Desember 2022) sampai tanggal 3 (Januari 2023)," kata Listyo Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/12).

Listyo Sigit menyampaikannya, secara menyeluruh sebanyak 166.000 petugas akan dikerahkan dalam rangka melakukan pengamanan. Ia mengatakan, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pengamanan rang-

kaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun.

"Saya kira secara menyeluruh 166.000 orang yang nanti akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Kepolisian," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit juga mengatakan bahwa kegiatan pengamanan di akhir dan awal tahun merupakan kegiatan rutin. Menurutnya, mobilitas masyarakat pada akhir dan awal tahun biasanya meningkat.

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan diprediksi akan ada peningkatan 44 juta warga yang akan melaksanakan mobilitas.

"Baik dari masyarakat yang akan melaksanakan mudik, yang akan melaksanakan libur dan melaksanakan liburan karena memang sekolah-seko-

lah dan tentunya masyarakat yang bekerja libur," kata Listyo Sigit.

"Dan juga tentunya ada kegiatan perayaan ibadah di tanggal 25 baik malam kemudian siang dan di acara tutup tahun yang biasanya juga seluruh rangkaian kegiatan menjadi satu," ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan Operasi Lilin 2022 terkait pengamanan jelang akhir tahun.

Agung menekankan bahwa fokus operasi lilin meliputi kelancaran lalu lintas serta kenyamanan ibadah Natal 2022 dan liburan tahun 2023.

"Operasi lilin sedang kita siapkan dengan fokus kelancaran lalu lintas, penyeberangan antar pulau, dan kenyamanan liburan serta beribadah natal dan tahun baru," kata Agung saat dikonfirmasi, Senin (12/12).

Menurut Agung, saat ini Polri masih akan

melakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk mematangkan pelaksanaan Operasi Lilin 2022. Ia mengatakan, Operasi

Lilin 2022 akan dipimpin oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantiyabudi. ● han

Menko PMK Tegaskan Tidak Ada Cuti Bersama 26 Desember 2022

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meralat pernyataannya soal cuti bersama Natal pada tanggal 26 Desember 2022. Muhadjir menegaskan tidak ada cuti bersama pada tanggal tersebut.

Muhadjir menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Desember mendatang masyarakat boleh mengajukan cuti. Namun, bukan berarti pada tanggal tersebut dilakukan cuti bersama.

"Maaf saya khilaf. Tanggal 26 (Desember) boleh mengambil cuti, tetapi bukan cuti bersama. Terimakasih atas klarifikasinya," katanya saat dihubungi, Jumat (16/12).

Pernyataan Muhadjir soal cuti bersama pada 26 Desember mendatang itu disampaikan usai rapat koordinasi dengan Polri dan kementerian lainnya di Mabes Polri. Muhadjir mengatakan bahwa tanggal 26 Desember merupakan hari libur. Sebagai informasi, libur

nasional pada bulan Desember 2022 hanya tersisa satu yakni Natal yang jatuh pada hari Minggu (25/12). Ketetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066/2022, Nomor 03/2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023, tidak ada cuti bersama untuk merayakan tahun baru 2023. ● mei



IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN REKTOR NONAKTIF UNILA
Tersangka Rektor nonaktif Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/12). Karomani menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022.

Doni Salmanan Bakal Banding Setelah Divonis 4 Tahun Penjara

BANDUNG (IM) - Doni Salmanan berencana mengajukan banding setelah mejelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara pada persidangan, Kamis (15/12).

Ikbar Firdaus, kuasa hukum Doni Salmanan, menuturkan pihaknya akan berunding terlebih dahulu dengan Doni Salmanan. Sehingga, waktu tujuh hari yang diberikan oleh hakim, akan dimanfaatkan untuk memutuskan langkah hukum selanjutnya.

"Kita kan coba pikir-pikir dulu, pasti akan upaya hukum juga. Banding. Terkait beberapa pertimbangan majelis hakim yang sama-sama kita dengar. Detilnya mungkin Senin, setelah kita menerima salinan asli putusan tersebut. Karena ada beberapa hal yang belum jelas," ujar Ikbar, saat ditemui usai persidangan, Kamis (15/12).

Ikbar menuturkan saat ini pihaknya masih akan menunggu salinan putusan tersebut. Usai salinan diterima, pihaknya akan melakukan analisa.

Ikbar menyoroti soal putusan hakim terhadap kliennya. Salah satunya terkait tuduhan pasal menyebabkan

berita bohong. Menurutnya, selama persidangan, Doni Salmanan kerap berkata jujur.

Pihaknya menegaskan hal tersebut akan menjadi pertimbangan untuk melakukan perlawanan hukum. Agar kliennya bisa dihukum ringan.

Dia mengaku keberatan terkait kliennya dijerat dengan berita bohong. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar mengajukan banding.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Mumuh Ardiansyah mengatakan, JPU juga mengambil sikap banding.

"Sikap JPU, kami dikasih kesempatan 7 hari ke depan untuk menyatakan sikap, dan 7 hari ke depan lagi untuk menyusun memori banding, pada endingnya kami pasti banding," ujar Mumuh.

"Tadi sudah mendengar langsung putusan Doni M Taufik alias Doni Salmanan, hakim memutuskan yang terbuk-

tikan itu di pasal alternatif pertama, pasal 45 itu. Dan tidak terbukti di UU TPPU, tadi majelis hakim vonis 4 tahun, jauh dari tuntutan kami, tim JPU. Bahwa tim JPU tuntutan 13 tahun, tapi hakim vonis 4 tahun," katanya. ● han

Bawaslu Ungkap Jakarta Jadi Provinsi Paling Rawan Pelanggaran Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Bawaslu RI umumkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). DKI Jakarta menjadi provinsi paling rawan pelanggaran pemilu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan data indeks ini dihasilkan dengan dua pendekatan analisa. Dia menyebut pendekatan pertama berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi dan pendekatan kedua berdasarkan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.

"Ada lima provinsi yang rawan tinggi. Ternyata DKI Jakarta dengan 88,95, disusul Sulawesi Utara dengan 87,48, disusul Maluku Utara 84,86, Jawa Barat 77,04, dan Kalimantan Timur 77,04," kata Lolly Suhenty di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12).

Sedangkan, untuk pendekatan kedua, Lolly mengatakan ada 10 provinsi yang rawan pemilu. Diantara-

ranya, Provinsi Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Lolly mengatakan untuk kerawanan pemilu tertinggi di tingkat kabupaten/kota tercatat ada sebanyak 85 kabupaten/kota atau sebesar 16,54 persen. Selanjutnya, untuk kerawanan sedang ada 349 kabupaten/kota atau sebesar 67,90 persen.

"Terdapat 80 kabupaten/kota atau sebesar 15,56 persen yang masuk kategori kerawanan rendah," ujarnya.

"Untuk 10 kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi, separuh diantaranya berasal dari Provinsi Papua," ujarnya.

Lolly lalu merinci 10 kabupaten/kota tersebut. Lima di antaranya berada di Papua yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya, untuk lima kabupaten/kota lainnya,

ialah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Pangdajene (Banten), Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Makana (NTT), dan Kabupaten Bandung (Jawa Barat).

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pemilihan serentak 2024. IKP ini merupakan upaya untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam pemilu.

Grand launching IKP digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12). Ketua Bawaslu Rahmat Bagia mengatakan IKP merupakan parameter untuk melihat sehat atau tidak demokrasi di Indonesia.

"IKP ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini jadi program prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita semua," kata Bagia dalam sambutannya. ● han



IDN/ANTARA

PEMERIKSAAN LANJUTAN WILDAN YULIANTO

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan nonaktif, Wildan Yulianto (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/12). Wildan Yulianto menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap lelang jabatan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

PENAHANAN TERSANGKA SUAP DANA HIBAH JAWA TIMUR

Petugas menunjukkan barang bukti hasil kegiatan tangkap tangan KPK disaksikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (atas tengah) didampingi Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Juru Bicara Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/12) dini hari.

PENGUMUMAN
Bahwa PT. SKY INVESTMENT INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yaitu suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan ini melakukan pelepasan 99% saham dalam Perseroan kepada PT. ROSA WIDARI, berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo.
Bagi pihak-pihak yang berkorelasi termasuk kreditor atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:
PT. SKY INVESTMENT INDONESIA
Jalan Cimandiri 6, Lantai 3 Nomor. 5
Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat - 10330
atau
Jalan Selamat Riyadi 315,
Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura
Kabupaten Sukoharjo - 57169
Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 127, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 17 Desember 2022
Direksi